

Lembar Kerja Peserta Didik

Nama Kelompok: _____

Petunjuk Pengerjaan

1. Tulislah identitas kelompok anda
2. Tunjukkan salah satu anggota menjadi juru tulis
3. Jawablah dan diskusikan soal-soal berikut dibawah ini

Bacalah bacaan berikut ini!

Konsep Trias Politica menurut Montesquieu

Trias politica berasal dari Bahasa Yunani yaitu "tri" yang berarti tiga, "as" yang berarti poros atau pusat, dan "politica" yang memiliki arti kekuasaan. Secara utuh, trias politica diartikan sebagai suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa terdapat tiga macam kekuasaan dalam sebuah negara. Konsep trias politica dari Montesquieu menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dengan kedudukan yang sederajat. Sehingga, dapat saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Menurut Montesquieu, pemisahan kekuasaan dilakukan untuk membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang akan melahirkan kesewenang-wenangan. Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.

Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan negara yang melaksanakan atau menjalankan undang-undang. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang raja atau presiden beserta kabinetnya. Kekuasaan eksekutif juga memiliki kewenangan diplomatik, yudikatif, administratif, legislatif, dan militer. Di Indonesia, lembaga eksekutif dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Lembaga eksekutif di Indonesia diduduki jabatan politis yaitu presiden, wakil presiden, dan para menteri. Selain jabatan politis, lembaga eksekutif juga terdiri atas aparat birokrasi pemerintahan yang membantu mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan oleh presiden.

Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan negara yang bertugas membuat peraturan dan undang-undang. Lembaga legislatif dibuat untuk mencegah kesewenang-wenangan raja atau presiden. Kekuasaan legislatif adalah wakil dari rakyat, yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya. Kekuasaan legislatif memiliki hak untuk meminta keterangan terkait kebijakan kepada lembaga lain. Selain hak meminta keterangan, kekuasaan legislatif juga memiliki hak mosi tidak percaya. Hak ini berpotensi untuk menjatuhkan kekuasaan eksekutif. Pelaksana fungsi kekuasaan legislatif di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan negara yang mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuasaan kehakiman. Kekuasaan yudikatif dibentuk sebagai alat penegak hukum, penguji material, penyelesaian perselisihan, serta mengesahkan atau membatalkan peraturan yang bertentangan dengan dasar negara. Di Indonesia, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh dua lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK dan Mahkamah Agung atau MA. Selain itu, terdapat Komisi Yudisial atau KY yang memiliki kewenangan mengusulkan calon hakim agung, tetapi kedudukan KY adalah sebagai lembaga pelengkap karena KY bersifat mandiri atau lembaga independen.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/01000001/trias-politica-menurut-montesquieu?page=all>.

Pilihlah jawaban yang sesuai dengan memberi garis

Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan negara yang bertugas membuat peraturan dan undang-undang

Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan negara yang mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuasaan kehakiman

Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan negara yang melaksanakan atau menjalankan undang-undang

Link you tube : <https://www.youtube.com/watch?v=dFvZe1GHpUo&t=158s>

Pindahkan dari sisi kanan ke sisi kiri jika itu merupakan fungsi atau kewenangan dari lembaga negara tersebut

MPR

Mengadakan dan mengesahkan UU negara

Presiden

Melaksanakan kekuatan kehakiman tertinggi

MK

Mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945

MA

Mengurus tuntutan rakyat atas kelayakan UU/ peraturan

KY

Pengawasan terhadap para hakim

DPR

Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, AU dan Kepolisian Negara

Bacalah cerita dibawah ini

Pada suatu hari, di sebuah sekolah menengah atas di Jakarta, ada seorang siswa bernama Andi yang sedang mengikuti pelajaran sejarah. Gurunya, Pak Budi, sedang menjelaskan tentang sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Pak Budi menjelaskan bahwa sistem pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari tiga lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif bertugas membuat undang-undang, lembaga eksekutif bertugas menjalankan undang-undang, dan lembaga yudikatif bertugas mengawasi jalannya undang-undang.

Andi mendengarkan penjelasan Pak Budi dengan seksama. Ia bertanya-tanya, bagaimana jika terjadi konflik antara ketiga lembaga tersebut? Bagaimana cara untuk menjaga agar ketiga lembaga tersebut tetap berjalan dengan baik?

Pak Budi menjawab pertanyaan Andi dengan menjelaskan bahwa sistem pembagian kekuasaan di Indonesia dirancang untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan. Dengan adanya pembagian kekuasaan, maka akan terjadi kontrol dan keseimbangan di antara ketiga lembaga tersebut.

Pak Budi juga menjelaskan bahwa jika terjadi konflik antara ketiga lembaga tersebut, maka konflik tersebut harus diselesaikan melalui jalur musyawarah. Jika musyawarah tidak berhasil, maka konflik tersebut dapat diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.

Andi merasa puas dengan penjelasan Pak Budi. Ia mengerti bahwa sistem pembagian kekuasaan di Indonesia penting untuk menjaga agar negara tetap berjalan dengan baik.

Pertanyaan

Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Sebutkan tiga lembaga yang berkuasa di Indonesia!
2. Mengapa pembagian kekuasaan di Indonesia penting?
3. Bagaimana cara menjaga agar pembagian kekuasaan di Indonesia berjalan dengan baik?